

MAKNA KUNJUNGAN WAKIL PRESIDEN AMERIKA SERIKAT KE SINGAPURA DAN VIETNAM BAGI ASIA TENGGARA

Sita Hidriyah

Abstrak

Kamala Harris baru saja melakukan kunjungan ke Singapura dan Vietnam dalam kunjungan ke luar negeri pertamanya sejak dilantik, mendampingi Presiden Joe Biden, sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat pada Januari 2021. Kajian singkat ini mencoba menganalisis kunjungan Wapres Harris ke Singapura dan Vietnam tersebut dan berusaha untuk memahami maknanya bagi Asia Tenggara. Hasil pembahasan mengungkapkan, bagi Asia Tenggara, kunjungan Harris ke Singapura dan Vietnam dapat dimaknai sebagai adanya upaya dari Amerika Serikat (AS) untuk kembali memperkuat kerja sama antara AS dan ASEAN dalam bidang ekonomi serta dalam upaya pemeliharaan keamanan dan perdamaian kawasan berdasarkan hukum internasional. Kunjungan Harris ke Singapura sebagai salah satu pusat perdagangan dunia, bisa dimaknai dalam konteks ekonomi. Sedangkan kunjungan Harris ke Vietnam, salah satu negara ASEAN yang sedang berkonflik dengan China di Laut China Selatan, bisa dimaknai dalam konteks pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian kawasan.

Pendahuluan

Kamala Harris melakukan kunjungan luar negeri pertamanya ke luar Amerika Serikat (AS), sejak dilantik sebagai Wakil Presiden AS pada Januari 2021, dengan mengunjungi Singapura dan Vietnam. Kunjungan di Singapura dilakukan Harris pada tanggal 22 dan 23 Agustus, dilanjutkan dengan kunjungan ke Vietnam pada tanggal 24 dan 25 Agustus 2021. Kunjungan Harris ke dua negara Asia Tenggara tersebut sudah tentu, tidak terjadi begitu saja, tetapi dilatarbelakangi

oleh kepentingan AS atas kawasan ini, baik kepentingan ekonomi maupun kepentingan politik dan keamanan.

Dalam kunjungan ke Singapura dan Vietnam, media menyebut kunjungan Wapres AS tersebut tidak terlepas dari upaya AS menghadapi dominasi China di Asia Tenggara, antara lain di bidang ekonomi dan keamanan kawasan. AS menganggap kedua negara (Singapura dan Vietnam) cukup solid dalam membangun perekonomian dan perdagangan,



sehingga bisa diandalkan dalam menghadapi dominasi China di kawasan (Kompas, 23 Agustus 2021). Kunjungan Harris, sudah tentu juga, tidak terlepas dari adanya kepentingan AS untuk merespons pengaruh China di Indo-Pasifik, khususnya Laut China Selatan (LCS). Menjadi menarik kemudian untuk dibahas lebih dalam, mengapa Wapres AS mengunjungi Singapura dan Vietnam dalam kunjungan pertamanya ke luar negeri, dan apa maknanya bagi Asia Tenggara?

Kunjungan Wapres AS ke Singapura

Dalam kunjungannya di Singapura, selain melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Lee Hsien Loong, Wapres AS Kamala Harris juga berkesempatan melakukan pembicaraan singkat dengan Presiden Halimah Yacob di Istana Negara Singapura pada hari pertama kunjungannya. Dalam pertemuan dengan PM Lee, Kamala Harris sepakat bahwa AS dan Singapura perlu mengembangkan kerja sama kemitraan di berbagai bidang, antara lain di bidang keamanan siber, perubahan iklim, dan ekonomi. AS dan Singapura juga sepakat bekerja sama dalam penanganan pandemi Covid-19 dan luar angkasa (liputan6.com., 23 Agustus 2021). Untuk keamanan siber, kedua negara sepakat akan melakukan penguatan kerja sama, antara lain di bidang pertahanan, keuangan, serta penelitian dan pengembangan, termasuk berbagi praktik terbaik.

Untuk bidang iklim, AS dan Singapura sepakat meluncurkan kemitraan iklim (*US-Singapore*

Climate Partnership). Kerja sama tersebut akan memperkuat kolaborasi kedua negara dalam bidang aksi iklim, tata kelola lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan solusi rendah karbon. Kemitraan ini akan menciptakan peluang bagi bisnis dan pekerja di sektor pertumbuhan hijau. Adapun area kerja sama potensial di bawah kemitraan tersebut mencakup keuangan berkelanjutan, transisi energi, pasar karbon berkualitas, serta konsultasi ahli, misalnya dalam pengaturan standar hijau (bisnis.com., 23 Agustus 2021). Kedua negara juga sepakat bekerja sama dalam pengembangan kapasitas *smart city* yang baru, dan akan terus menjajaki peluang kerja sama di lebih banyak bidang terkait perubahan iklim dan ekonomi hijau. Kerja sama di bidang iklim, secara tidak langsung, menunjukkan komitmen kedua negara untuk mengimplementasikan Perjanjian Paris (*Paris Agreement*), sebuah kesepakatan global untuk menanggulangi perubahan iklim.

Peningkatan kerja sama di bidang ekonomi juga menjadi perhatian kedua negara. Wapres Harris dan PM Lee sepakat meningkatkan hubungan dagang kedua negara, sebagai tindak lanjut dari telah ditandatanganinya nota kesepahaman AS-Singapura pada Desember 2020 tentang hubungan dagang. Saat itu, nota kesepahaman ditandatangani oleh Menteri Perdagangan AS Wilbur Ros dan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Chan Chun Sing di Washington. Kedua negara kini sedang memulihkan ekonominya yang terdampak hebat oleh pandemi Covid-19. Sejauh

ini, AS merupakan investor asing terbesar di Singapura dan sebaliknya Singapura merupakan negara Asia dengan investasi terbesar keempat dalam perekonomian AS. Dalam kesempatan kunjungan di Singapura, Harris dan Lee juga meluncurkan Kemitraan untuk Pertumbuhan dan Inovasi, yang dipimpin oleh Departemen Perdagangan AS dan Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura, yang antara lain fokus pada pengembangan ekonomi digital, energi, dan manufaktur mutakhir (bisnis.com., 23 Agustus 2021).

Isu keamanan juga menjadi bagian yang dibahas dalam kunjungan Harris ke Singapura. Singapura memang bukan sekutu AS, tetapi mereka menjadi salah satu mitra keamanan terkuat AS di Kawasan Asia Tenggara. Dalam konferensi pers, se usai pertemuan dengan Wapres Harris, PM Lee mengemukakan bahwa keberadaan Pangkalan Angkatan Laut Changi milik Singapura, dipersilakan digunakan oleh kapal-kapal Angkatan Laut AS untuk bersandar dan untuk kepentingan menjaga stabilitas keamanan kawasan. Pangkalan Angkatan Laut Changi, di mana saat itu juga tengah hadir kapal tempur USS Tusla, juga menjadi bagian dari agenda kunjungan Wapres Harris di Singapura (*The Jakarta Post*, 23 Agustus 2021). Kunjungan Harris ke Pangkalan Angkatan Laut Changi bisa ditafsirkan sebagai simbol dukungan AS terhadap pentingnya menjaga kebebasan navigasi lanjutan di kawasan ini, yang diarahkan AS ke China yang sedang berkonflik teritorial di Laut China Selatan (LCS)

dengan sejumlah negara ASEAN.

Kunjungan Wapres AS ke Vietnam

Vietnam menjadi tujuan kunjungan Wapres Harris berikutnya di Asia Tenggara. Di Vietnam, Harris melakukan pertemuan dengan Presiden Nguyen Xuan Phuc, Wakil Presiden Vo Thi Anh Xuan, dan PM Pham Minh Chinh. Posisi Vietnam sebagai salah satu negara ASEAN yang sedang berkonflik dengan China di LCS, mewarnai pembicaraan Harris dengan para petinggi negeri itu di Hanoi. Harris menawarkan kunjungan lebih banyak kapal perang AS ke LCS. Tawaran itu sebagai bentuk jaminan Washington atas keamanan maritim Vietnam di tengah peningkatan dinamika di LCS, khususnya terkait dengan kehadiran China (kompas.id., 25 Agustus 2021). Tawaran itu sekaligus menegaskan posisi AS dalam menjadikan Vietnam sebagai “sekutu utama” Washington di Asia Tenggara bersama Singapura.

Soal LCS, AS mendukung keputusan Mahkamah Internasional di Belanda pada 2016 tentang batas kelautan LCS yang dibagi ke wilayah China, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Taiwan. Sementara China bersikukuh memakai sistem mereka sendiri yang disebut ‘sembilan garis putus-putus’ atau *nine-dash line* (yang tidak dikenal dalam hukum internasional), batas imajiner yang dibuat China untuk menguasai LCS. Tawaran Harris kepada pemimpin Vietnam di atas, seakan menegaskan dukungan AS untuk negara-negara yang bersengketa teritorial dengan China di LCS, sebagaimana

pernah diungkapkan Joe Biden pasca-pelantikannya sebagai Presiden AS pada Januari 2021. AS menentang setiap upaya sepihak dari suatu negara untuk mengubah *status quo* di wilayah yang masih dipersengketakan dan menuntut adanya kebebasan navigasi di LCS.

Kunjungan Harris ke Vietnam, sudah tentu juga, dilatarbelakangi oleh kepentingan ekonomi. Normalisasi dengan musuh lama AS tersebut dimulai pada awal 1994, ketika Presiden Clinton mengumumkan pencabutan embargo perdagangan selama 19 tahun terhadap Vietnam. Selanjutnya, sejak dibukanya kembali hubungan diplomatik kedua negara pada 1995, AS dan Vietnam terus berupaya membangun hubungan ekonomi. Iklim investasi asing yang dibangun di Vietnam yang terbuka bagi pasar dunia, menjadi salah satu penarik bagi investor AS untuk menanamkan modalnya dan berusaha di Vietnam.

Akhir-akhir ini, meskipun China sedang berkonflik dengan Vietnam di LCS, kehadiran perusahaan-perusahaan China di Vietnam tetap diterima dengan baik, dan kehadirannya cukup mendominasi dan menjadi pesaing bagi investor asing lainnya, termasuk bagi AS. Dominasi dan pengaruh ekonomi China di Vietnam, dan di negara-negara ASEAN lainnya inilah yang coba dibendung oleh AS, antara lain melalui kunjungan Wapres Harris ke Vietnam. Vietnam menyambut baik kerja sama ekonomi dengan AS, namun juga menegaskan bahwa Hanoi tidak ingin terjebak dalam persaingan ekonomi, atau bahkan

perang dagang AS-China.

Makna Kunjungan Wapres AS bagi Asia Tenggara

Kunjungan Wapres Harris ke Singapura dan Vietnam sudah pasti membawa kepentingan bilateral AS dengan kedua negara tersebut. Namun tidak dapat dielakkan bahwa kunjungan Harris tersebut perlu juga dilihat maknanya bagi Asia Tenggara, karena secara faktual Singapura dan Vietnam berada di kawasan Asia Tenggara dan juga sebagai negara anggota ASEAN. Dalam hubungannya dengan Singapura, misalnya, kunjungan Harris ke negara tersebut bisa dibaca dalam konteks ekonomi. Kedudukan Singapura sebagai pusat jasa ekonomi dan perdagangan utama di Asia Tenggara, bahkan Asia Pasifik dan dunia, dapat dimaknai adanya kepercayaan dan harapan AS terhadap Asia Tenggara untuk dapat tetap menjadi kawasan yang bisa diandalkan untuk kepentingan ekonomi AS.

Kunjungan Kamala Harris ke Asia Tenggara merupakan peluang bagi AS untuk memanfaatkan peluang dan jaringan perdagangan Asia-Pasifik, setelah negara ini mengalami kerugian besar akibat keluar dari Kemitraan Trans-Pasifik (*Trans-Pacific Partnership*) di era Presiden Donald Trump. Sebaliknya, bagi Asia Tenggara, kunjungan Wapres Harris, terlepas dari adanya upaya AS untuk membendung pengaruh ekonomi China di kawasan ini, merupakan peluang bagi ASEAN untuk kembali menata dan memperkuat kerja sama ekonomi dengan AS yang dirasakan kurang maksimal pada era pemerintahan AS

sebelumnya (era pemerintahan Trump). Bisa jadi, di tengah situasi pandemi Covid-19 yang belum berakhir, dan dilatarbelakangi oleh kepentingan AS di kawasan, Wapres Harris memang harus selektif dalam menentukan negara yang akan dikunjunginya, namun tetap membawa pesan dan misi kepentingan AS di kawasan.

Ketika mengunjungi Vietnam, selain membawa misi bilateral, misi kepentingan AS di kawasan, utamanya dalam menghadapi dominasi China, tampak semakin terlihat dalam pembicaraan Wapres Harris dengan para pemimpin Vietnam. Posisi Vietnam sebagai salah satu negara yang sedang berkonflik dengan China di LCS, tampaknya digunakan secara kritis oleh Harris untuk mengajak Vietnam, dan secara tidak langsung juga ASEAN, untuk menjaga dan menegakkan kebebasan navigasi di LCS, salah satu jalur pelayaran strategis dunia dan sangat penting bagi AS. Oleh karena itu tidak mengherankan jika dalam kunjungannya di Vietnam, Harris menawarkan kehadiran kapal-kapal perang AS di perairan yang sedang dipersengketakan itu. Hal ini mengandung makna bahwa Vietnam, dan ASEAN sebagai Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara, harus bersikap solid dalam menyikapi sengketa teritorial di LCS antara sejumlah negara ASEAN dengan China.

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, terlihat bahwa kunjungan Wapres Harris ke Singapura dan Vietnam dapat dimaknai dalam konteks kepentingan ekonomi dan

keamanan kawasan. Asia Tenggara merupakan sarang persaingan perdagangan dan militer antara China dan AS, yang di dalamnya terkandung persaingan di antara ke dua negara besar tersebut untuk menanamkan pengaruhnya secara ekonomi dan keamanan di kawasan. Bagi Asia Tenggara, kunjungan Harris di atas dapat dimaknai sebagai adanya upaya dari AS untuk kembali memperkuat kerja sama antara AS dan ASEAN dalam bidang ekonomi serta dalam upaya pemeliharaan keamanan dan perdamaian kawasan berdasarkan hukum internasional. Kunjungan Harris ke Singapura sebagai salah satu pusat perdagangan dunia, bisa dimaknai dalam konteks ekonomi. Sedangkan kunjungan Harris ke Vietnam, salah satu negara ASEAN yang sedang berkonflik dengan China di LCS, bisa dimaknai dalam konteks pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian kawasan.

Referensi

- “AS Pilih Sekutu Singapura-Vietnam”, *Kompas*, 23 Agustus 2021, hal. 4.
- “AS Tawarkan Lebih Banyak Kehadiran di Laut China Selatan”, <https://www.kompas.id/label/kunjungan-kamala-harris-ke-vietnam>, diakses 7 September 2021.
- “Kamala Harris visits Singapore to deepen ties”, *the Jakarta Post*, 23 Agustus 2021, hal. 6.
- “Kerja Sama Baru AS-Singapura, Mulai dari Keamanan Siber hingga Penanganan Covid-19” <https://www.liputan6.com/global/read/4638929/kerja-sama-baru-as-singapura-mulai>

dari-keamanan-siber-hingga-penanganan-covid-19, diakses 7 September 2021.

"Kemitraan Iklim Singapura-AS Ciptakan Peluang Bisnis di Sektor Hijau", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210823/620/1432857/kemitraan-iklim-singapura-as-ciptakan-peluang-bisnis-di-sektor-hijau>, diakses 8 September 2021.

"Vietnam Klaim Netral soal AS-China", *Kompas*, 26 Agustus 2021, hal. 4.

"Wapres AS Umumkan Inisiatif Rantai Pasokan Baru dengan Singapura", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210823/620/1432806/wapres-as-umumkan-inisiatif-rantai-pasokan-baru-dengan-singapura>, diakses 8 September 2021.



Sita Hidriyah
sita.hidriyah@dpr.go.id

Sita Hidriyah, S.Pd.,M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Keguruan Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Atmajaya Jakarta pada tahun 2005 dan pendidikan S2 Hubungan Internasional dari FISIP Universitas Indonesia pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda bidang Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Upaya Pemerintah dan Kerjasama Luar Negeri Dalam Pengentasan Kemiskinan Menuju Pembangunan Berkelanjutan" (2013), "Pengungsi Suriah dan Respons Internasional dan Asian Parliamentary Assembly (APA)" (2016), dan "Tantangan Kerjasama Indonesia dan Jepang Dalam Diplomasi Ekonomi " (2016).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.